

Pengaruh Kompetensi Pendidikan Terhadap Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu

Agung S.P.S. Langitan¹

Daud M. Liando²

Stefanus Sampe³

Email Korespondensi: agunglangitan17@gmail.com

ABSTRAK

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Kompetensi Pendidikan terhadap Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu. Pengaruh pendidikan terhadap kinerja seseorang cukup signifikan dalam suatu pekerjaan, hal tersebut juga berlaku bagi profesi sebagai anggota dewan, dalam kinerjanya pada proses pengambilan keputusan, pembuatan undang-undang serta menjalankan fungsi-fungsi lainnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil pengujian uji hipotesis diketahui bahwa nilai signifikansi menunjukkan sebesar 0.005 yang dimana lebih kecil dari 0.05 hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, artinya bahwa Kompetensi Pendidikan berpengaruh terhadap Kinerja DPRD Kota Palu. Berdasarkan data yang diperoleh maka item pernyataan yang paling dominan dalam variabel pendidikan yakni Kompetensi dengan presentase 86 % responden setuju terhadap pernyataan ini kemudian item kesesuaian jurusan dengan presentase 60 % responden setuju terhadap pernyataan ini dan juga jenjang pendidikan dengan persentase 57 % responden setuju terhadap pernyataan ini.

Kata Kunci: Pengaruh, Pendidikan, Kinerja, DPRD

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan yang demokratis didelegasikan kepada wakil rakyat yang merupakan pilihan dari rakyat. Lembaga perwakilan rakyat mempunyai kewajiban untuk menampung aspirasi dan melayani apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, Lembaga perwakilan rakyat di Indonesia dikenal dengan sebutan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR – RI) Pada tingkat pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pada tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota. DPRD yang berada di tingkat daerah bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan dan mengurus kepentingan masyarakat. DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat di tingkat daerah yang memiliki kedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, Dalam menyelenggarakan roda pemerintahan pada tingkat daerah, DPRD mempunyai kedudukan yang sejajar dengan pemerintahan daerah sehingga DPRD memiliki tanggung jawab yang sama dengan pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, maka pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan yang berhubungan dengan pemerintah daerah masing-masing. Merujuk pada undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang

pemerintahan daerah, Menyebutkan bahwa definisi DPRD adalah sebuah lembaga perwakilan rakyat daerah yang terlibat dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan di daerah terutama yang tertuang dalam peraturan daerah.

Sebagai lembaga representatif rakyat dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan berkualitas di daerah maka secara garis besar peran DPRD diwujudkan dalam tiga fungsi yaitu, Fungsi Legislasi diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama-sama kepala daerah, Fungsi Budgeting diwujudkan dalam membahas, memberikan persetujuan dan menetapkan APBD bersama pemerintah daerah, dan Fungsi Pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kinerja legislatif pada DPRD Kota Palu dari sisi fungsi legislasi atau pembuatan perda belum maksimal serta tidak terlalu mengena akan kebutuhan masyarakat selain itu dalam beberapa tahun terakhir yakni dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, Produktifitas DPRD hanya menghasilkan peraturan daerah sebanyak 21 perda yang semuanya di dominasi oleh perda yang bersifat turunan, rutin, dan khusus.

Berdasarkan penempatan anggota dewan di komisi masih banyak anggota dewan yang kurang sesuai dengan penempatannya dan bahkan masih banyak pula anggota dewan dengan jenjang pendidikan SMA. Hal ini tentunya berdampak pada

pembuatan kebijakan atau pelaksanaan perda sesuai dengan ruang lingkup komisi yang membutuhkan kecermatan dan kepiawaian seseorang dalam membuat peraturan yang akan di terapkan.

Hal serupa terjadi pula pada bagian badan anggaran dimana sebagian anggota dewan kurang sesuai dengan disiplin ilmu pada penempatan posisinya dan bahkan masih ada juga anggota dewan yang berpendidikan jenjang SMA.

Hal ini membuat anggota dewan dalam melakukan pembahasan-pembahasan mengenai penyusunan anggaran belanja DPRD serta dalam memberikan pendapat terhadap rancangan kebijakan APBD pun mempunyai keterbatasan dan bahkan ada anggota dewan yang hanya sekedar mengikuti jalannya rapat bangar, padahal pada bagian ini sangat spesifik yang membutuhkan kecermatan dalam hal pengetahuan ilmu ekonomi hal ini tentu berdampak pada kinerja DPRD itu sendiri. Kapasitas dan latar belakang yang berbeda-beda dari anggota-anggota dewan hal ini membuat produktifitas kinerja mereka juga ikut berpengaruh

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2005).

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang ingin diteiti (Arikunto, 2016). Menurut Arikunto

(2008) bahwa untuk subjek kurang dari 100, maka lebih baik di ambil semua, Maka merujuk pada pendapat ahli di atas bahwa penentuan ukuran sampel dilakukan dengan menggunakan sampel jenuh atau sensus dimana semua populasi dijadikan responen, maka keseluruhan anggota DPRD 35 orang dijadikan responden.

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan dokumentasi.

Table 1 . Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator
Variabel Independen			
1.	Pendidikan (X)	Menurut Tirtaraha rdja, Pendidikan adalah sesuatu yang universal dan berlangsung terus menerus dan tak terputus dari generasi ke generasi di manapun . Upaya memanusiakan manusia melalui pendidikan itu diselenggarakan sesuai dengan	1. Jenjang Pendidikan 2. Kesesuaian Jurusan 3. Kompetensi

		pandangan hidup dan latar belakang sosial setiap masyarakat tertentu.	
Variabel Dependen			
2.	Kinerja (Y)	Menurut Mangkungegara, Kinerja (Prestasi Kerja) adalah hasil kerja secara kualitas yang ingin dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas 2. Kuantitas 3. Tanggung Jawab 4. Kerja Sama 5. Inisiatif

Pembahasan

Hasil pengujian uji validitas menunjukkan bahwa nilai r hitung di tiap item pertanyaan lebih besar dari 0.05 atau r tabel hal tersebut menunjukkan bahwa tiap pertanyaan dinyatakan valid. Sedangkan nilai signifikansi pada tiap item pertanyaan sebesar 0,000 dan 0,001 yang dimana

lebih kecil dari 0,05 hal tersebut menunjukkan bahwa tiap pertanyaan signifikan. Apabila nilai r hitung lebih besar dari pada nilai r tabel maka kuesioner tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 2018).

Uji Reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang mempunyai indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2018). Uji Reliabilitas bertujuan memberikan jawaban responden terhadap pertanyaan di katakan reliabel jika masing-masing pertanyaan dijawab secara konsisten atau tidak. Dalam Penelitian ini menggunakan SPSS dan Rumus Cronbach's Alpha, Kuesioner dikatakan baik atau reliabel jika nilai cronbach's alpha lebih besar dari 0,06. (Sujerweni, 2014).

Hasil pengujian uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Cronbach's alpha di tiap item pertanyaan lebih besar dari 0.06 hal tersebut menunjukkan bahwa tiap pertanyaan dinyatakan reliabel. Kuesioner dikatakan baik atau reliabel jika nilai cronbach's alpha lebih besar dari 0,06 (Sujerweni, 2014).

Uji asumsi klasik merupakan tahap awal yang digunakan sebelum analisis regresi linier dilakukannya pengujian ini untuk dapat memberikan kepastian agar koefisien regresi tidak bias serta konsisten dan memiliki ketepatan dalam estimasi (Ghozali, 2018).

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini menggunakan SPSS dan Rumus Kolmogorov Smirnov.

Adapun kriteria ketentuan pengujian Kolmogorov Smirnov test dengan ketentuan yang harus dipenuhi

jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka data yang digunakan dalam penelitian memiliki distribusi yang normal. Namun kebalikannya jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka data yang digunakan tidak memiliki distribusi normal. Jika nilai memenuhi asumsi normalitas maka dapat diinterpretasikan dan dapat dilanjutkan. Berdasarkan hasil uji normalitas di atas diketahui nilai signifikansi 0,200 atau lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Analisis regresi linier sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan antara satu variabel independen dan variabel dependen yang bertujuan untuk melihat memperkirakan sebab akibat yang terjadi antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Analisis regresi sederhana bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Prediksi perubahan satu variabel dependen berdasarkan perubahan satu variabel independen tersebut.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat nilai signifikan pada tabel koefisien dasar pengujian hasil regresi dilakukan dengan taraf signifikan 0,05 Adapun kriteria dari uji statistik. (Ghozali, 2016)

1. Jika nilai uji regresi lebih besar ($>$) 0.05 artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai uji regresi lebih kecil ($<$) 0.05 artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Hasil pengujian hipotesis uji T pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel independen sebesar 0.005 yang dimana lebih kecil dari 0.05 hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen memiliki

pengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016).

Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik percobaan yang terkontrol, maupun dari observasi. Pengujian yang dilakukan terhadap suatu pernyataan atau dugaan atas permasalahan dalam suatu penelitian.

Uji T menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain konstan. Pengujian ini didasarkan pada tingkat signifikansi 0,05.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat nilai signifikan pada tabel koefisien dasar pengujian dilakukan dengan taraf signifikan 0,05. Adapun kriteria dari uji statistik (Ghozali, 2016).

1. Jika nilai uji T > 0.05 artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai uji T < 0.05 artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Hasil pengujian diketahui uji T pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0.005 yang dimana lebih kecil dari 0.05 hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Dari output tersebut diperoleh nilai R square sebesar 0,212 yang artinya bahwa pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 21%. Berdasarkan hasil pengujian maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis H_a di terima dan H_0 ditolak atau Kompetensi Pendidikan berpengaruh terhadap Kinerja DPRD Kota Palu.

Penutup

Kesimpulan

Hasil pengujian uji hipotesis diketahui bahwa nilai signifikansi menunjukkan sebesar 0.005 yang dimana lebih kecil dari 0.05 hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, artinya bahwa Kompetensi Pendidikan berpengaruh terhadap Kinerja DPRD Kota Palu. Maka pengambilan keputusan / jawaban atas penelitian ini sebagai berikut :

1. Ha : Kompetensi pendidikan berpengaruh terhadap Kinerja DPRD Kota Palu (Diterima) sedangkan,
2. Ho : Kompetensi pendidikan tidak berpengaruh terhadap Kinerja DPRD Kota Palu (Ditolak).

Berdasarkan data yang diperoleh maka item pernyataan yang paling dominan dalam variabel pendidikan yakni Kompetensi dengan presentase 86 % responden setuju terhadap pernyataan ini kemudian item kesesuaian jurusan dengan presentase 60 % responden setuju terhadap pernyataan ini dan juga jenjang pendidikan dengan persentase 57 % responden setuju terhadap pernyataan ini. Dapat disimpulkan bahwa kompetensi sangat penting untuk kapasitas dan kualitas anggota dewan. Kesesuaian jurusan membuat anggota dewan lebih baik dan memahami tugas dan fungsinya. Jenjang pendidikan membantu anggota dewan memahami tingkat dan kepekaan dalam melaksanakan tugas atau masalah yang dihadapinya.

Berdasarkan data yang diperoleh maka item pernyataan yang paling dominan dalam variabel kinerja item pernyataan Kualitas sebesar 77 % responden setuju terhadap pengawasan perda yang sudah sesuai dengan harapan, Item pernyataan kerja sama memiliki presentase 74 %

responden setuju terhadap kerja sama anggota dewan lainnya, Item pernyataan inisiatif sebesar 69 % responden setuju terhadap perda inisiatif yang dihasilkan, Item pernyataan tanggung jawab sebesar 66 % responden setuju bahwa sudah sesuai penetapan APBD dan merupakan bentuk pertanggung jawaban, Item pernyataan Kuantitas sebesar 54 % responden netral terhadap perda yang dihasil sudah sesuai dengan harapan.

Saran

1. Bagi partai seharusnya menempatkan kader yang memiliki kompetensi, kapasitas, dan kapabilitas untuk duduk dalam lembaga legislatif daerah.
2. Dalam jangka panjang guna pengembangan kualitas anggota legislatif daerah, partai politik sebagai institusi yang berkepentingan untuk menempatkan kader-kader terbiknya di lembaga perwakilan rakyat daerah, Perlu dilakukan proses
3. rekrutmen anggota secara selektif dan pembinaannya secara baik untuk meningkatkan peran dimasa depan, termasuk di dalamnya kompetensi, tingkat pendidikan, dan kesesuaian jurusan atau latar belakang pendidikan dalam rekrutmen anggota dewan bahkan kalau perlu dinaikkan minimal S1 dalam persyaratan untuk menjadi seorang anggota dewan.

Daftar Pustaka

- Analisis Pengaruh Pelatihan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT. Erajaya Swasembada Cabang Makassar. Universitas Hassanudin Makassar
- Amalia, 2013. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peran DPRD

- dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada DPRD Kabupaten Purworejo), Skripsi: Universitas Negeri Semarang.
- Haliadi Sadi, Syakir Mahid, dan Ismail Syawal (2015). Sejarah DPRD Kota Palu dan gagasan anggota terpilih untuk pembangunan kota palu periode 2014 – 2019. Pusat Penelitian Sejarah lemlit : Universitas Tadulako
- Nuru, Mawikere. 2013. Pengaruh Latar Belakang Pendidikan dan Pengalaman Politik terhadap Kinerja DPRD dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah/APBD, Jurnal Accountability:Universitas Sam Ratulangi.
- Mawikera. 2013. Pengaruh Latar Belakang Pendidikan dan Pengalaman Politik terhadap Kinerja DPRD, Jurnal Accountability
- Mustika, 2017 Pengaruh Kompetensi dan Pelatihan terhadap Kinerja Pegawai Kantor DPRD Provinsi Sumatra
- Rahayu Ani Sri. 2018, Pengantar pemerintahan daerah kajan teori, hukum dan aplikasinya. Jakarta : Sinar grafika
- Shaleh, 2013. Hakikat Pendidikan dan Pola Kepemimpinan terhadap Kinerja Anggota DPRD, Jurnal:Universitas Tribhuwana Tungadewi. 119 Sulaiman, 2018.
- Sharuddin, 2021 Pengaruh Kompetensi, Motivasi dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja dan kepuasan kerja anggota DPRD Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi-Selatan
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandaung : CV. Alfabeta.
- Sumiyanti, 2020 Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja anggota DPRD Kabupaten jayawijaya.
- Syahrir, 2017 Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Fungsi Pengawasan APBD Pada DPRD Kabupaten Bulukumba.
- Peraturan perundang-undangan
<https://dprd-palukota.jdihn.go.id>
<https://palukota.go.id>
Tata Tertib Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Tahun 2019-2024
Undang-Undang Nomor12 tahun 2008 tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah